

PEMASARAN HASIL TANGKAPAN DAN KEBIJAKAN PUMP DI PPN PALABUHANRATU

(Fish marketing and PUMP policy at Palabuhanratu Fishing Port)

Oleh:

Retno Muningsgar^{1*}, Ernani Lubis¹, Anwar Bey Pane¹

Diterima: 9 Januari 2013; Disetujui: 11 Maret 2013

ABSTRACT

The fish marketing problems in Palabuhanratu Archipelago Fishing Port (PPNP) happened in the marketing channel involving the owners of capital as a "bakul" (broker) or a wholesaler. The fishermen hope the dominance of broker can be reduced by the policy of capital provision to fishermen. Therefore, the dependence on broker can be disconnected and no more cheating in the PPNP auction system. The objectives of this research are to examine the marketing problems in PPNP and analyze effectiveness of Empowerment of Rural Mina (PUMP) policy. The research shows marketing margins that enjoyed by broker is Rp 9000/kg for tuna and Rp 7000/kg for skipjack. Tuna fisherman market share is 51.5%, while for skipjack is 40%. PUMP policy implementation in PPNP showed there are many brokers (tengkulak) who coordinate fishermen to be a business group in order to get help where the broker became its chairman. Policy analysis resulted that the PUMP program will be able to continue implementation consider several factors: First, doing the cultural approach to creating community relationships and fishermen welfare, Second: BLM program should be audited regularly. Third: evaluation and sustainability of the program should be implemented, and Fourth: should be followed by monitoring and law enforcement.

Keywords: Fish Marketing, Palabuhanratu, Policy, PUMP

ABSTRAK

Permasalahan pemasaran ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP) terjadi pada saluran pemasaran yang melibatkan pemilik modal yang berperan sebagai bakul atau pedagang besar. Nelayan berharap dominasi bakul/tengkulak bisa dikurangi salah satunya melalui kebijakan pemberian modal nelayan agar ketergantungan pada bakul bisa terputus dan tidak ada lagi kecurangan dalam sistem lelang di PPNP. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji permasalahan pemasaran yang ada di PPNP dan menganalisis efektifitas dari kebijakan Pemberdayaan Usaha Mina Perdesaan (PUMP). Hasil penelitian menunjukkan margin pemasaran yang dinikmati bakul sangat besar yaitu Rp 9000/kg untuk Tuna dan Rp 7000/kg untuk Cakalang. *Fisherman share* pemasaran ikan Tuna adalah 51,5% sedangkan Ikan Cakalang hanya 40%. Pelaksanaan kebijakan PUMP di PPNP menunjukkan bahwa masih banyak tengkulak yang mengkoordinir nelayan untuk menjadi kelompok usaha agar mendapat bantuan dimana tengkulak menjadi ketuanya. Hasil analisis kebijakan menunjukkan bahwa Program PUMP akan bisa berjalan dengan baik jika memperhatikan beberapa faktor: *pertama*,

¹ Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK-IPB

*Korespondensi: rmuninggar@yahoo.com

dilakukan melalui pendekatan kultural untuk menciptakan *community relationship* dan kesejahteraan nelayan, kedua: Bantuan Langsung Masyarakat harus rutin diaudit agar tidak ada penyalahgunaan dana dan modal benar-benar bisa sampai ke nelayan. ketiga : evaluasi dan keberlanjutan program harus dilakukan meski ada perubahan kepemimpinan, keempat : harus diikuti oleh mekanisme pengawasan dan penegakan hukum.

Kata kunci: Pemasaran Ikan, Palabuhanratu, Kebijakan, Pemberdayaan Usaha Mina Perdesaan (PUMP)

PENDAHULUAN

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP) merupakan pelabuhan perikanan yang terletak di wilayah Palabuhanratu kabupaten Sukabumi yang merupakan kawasan pioneer dalam program Minapolitan perikanan tangkap. Berbagai program minapolitan yang dijalankan di PPNP diharapkan mampu mendorong terciptanya kesejahteraan bagi nelayan di wilayah tersebut. Daya tarik PPNP sebagai pusat pendistribusian dan pemasaran ikan dari enam PPI di Kabupaten Sukabumi adalah karena terletak dipusat ibukota kabupaten dengan berbagai aspek perkembangannya, fasilitas pendukung pelabuhan sangat memadai, pusat perputaran arus jasa dan keuangan, industri pemasaran ikan segar tujuan ekspor serta akses jalan dan transportasi ke luar daerah yang mendukung (Statistik PPNP, 2008).

Sistem pemasaran ikan hasil tangkapan laut yang didaratkan di PPNP ada yang dipasarkan melalui TPI, dan ada pula yang tanpa melalui TPI. Pemasaran melalui TPI dilakukan berdasarkan hasil lelang dengan sistem penawaran tertinggi. Sedangkan pemasaran tanpa melalui TPI untuk ikan tujuan ekspor. Sistem pelelangan yang dilaksanakan di PPNP baru saja dibuka kembali bulan Agustus 2011 setelah sekian lama terhenti. Dibukanya kembali pelelangan ikan di TPI PPNP sebenarnya merupakan keinginan dari nelayan sendiri. Hal ini dikarenakan nelayan menginginkan harga ikan hasil tangkapannya menjadi lebih tinggi dibandingkan jika dijual tanpa lelang. Pemasaran ikan sebelum ada pelelangan adalah melalui bakul yang merupakan pemberi modal/juragan/tengkulak. Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan dijual dengan harga yang ditentukan sendiri oleh bakul dan biasanya lebih rendah dari harga ikan di TPI. Tidak adanya posisi tawar nelayan di hadapan para bakul di duga karena ketergantungan nelayan terhadap bakul sangat besar dalam peminjaman modal melaut dan juga pinjaman kebutuhan lainnya.

Pemasaran hasil tangkapan masih menjadi permasalahan yang dialami oleh nelayan di PPNP, hal ini dapat dilihat dari rendahnya harga jual ikan yang diperoleh nelayan. Bagian terbesar keuntungan jatuh ke tangan para pedagang dan pemilik modal, sementara itu para nelayan hanya menerima keuntungan yang sedikit namun menanggung resiko cukup besar berupa kecelakaan di laut juga resiko jangka panjang berupa degradasi lingkungan laut. Selain itu, ketiadaan modal merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh nelayan tradisional seperti yang terjadi di PPNP. Kesulitan modal menjadikan posisi tawar nelayan rendah dalam sistem pemasaran, nelayan tidak mendapatkan keuntungan yang layak bahkan seringkali merugi.

Pada tataran kebijakan praktis, untuk menyelesaikan problem pemodal di kalangan nelayan, pemerintah sebenarnya telah menginisiasi LKM (lembaga Keuangan Mikro) sejak tahun 2004 yang relatif independen sehingga mampu fleksibel dalam masalah peminjaman. Namun sejak tahun 2008 telah berganti program menjadi KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Ada kekhawatiran program-program

tersebut akan meniadakan LKM yang dibuat pemerintah. PNPM juga belum menyentuh seluruh kabupaten/kota pesisir. Pelaksanaannya pun masih ada kendala dari beberapa instansi lintas sektor (Satria, 2009). Saat ini program Kebijakan pemberian modal usaha yang baru dilaksanakan oleh Pemerintah tahun 2011 melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah program PUMP (Pengembangan Usaha Mina Perdesaan). Program ini pada dasarnya adalah program pemberian bantuan langsung atau disebut BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). Penelitian ini berusaha mengurai permasalahan pemasaran yang ada di PPNP sekaligus mengkaji sejauh mana efektifitas dari kebijakan pemberian modal (PUMP) yang dicanangkan pemerintah baru-baru ini. Kajian antara sistem pemasaran dan kebijakan pemberian modal ini sangat menarik dan juga penting dilakukan karena keduanya merupakan permasalahan yang saling terkait.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*case study*) dengan satuan kasus adalah sistem pemasaran ikan dan Kebijakan PUMP yang dijalankan di Pelabuhan Perikanan Palabuhanratu (PPNP). Pendekatan yang digunakan dalam studi kasus ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2011 di PPNP.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan dalam upaya mempelajari dan mengumpulkan data tertulis untuk menunjang penelitian. Data yang dikumpulkan berupa literatur yang berhubungan dengan topik permasalahan penelitian baik dalam bentuk buku, jurnal, prosiding, dokumen-dokumen dan sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan data melalui studi lapang adalah untuk mendapatkan data primer, dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara melalui pengisian kuesioner.

Pengamatan dilakukan terhadap 2 (dua) aspek yaitu:

- 1) Sistem pemasaran ikan yang ada di PPNP, meliputi: saluran pemasaran, margin pemasaran, biaya pemasaran, fisherman share dan sistem pelelangan ikan
- 2) Analisis kebijakan pemberian modal melalui program PUMP meliputi enam tahap proses analisis Kebijakan.

Wawancara dilakukan secara mendalam dan terstruktur melalui dialog langsung dengan pihak yang terkait yaitu nelayan dengan alat tangkap dominan yaitu pancing/rumpon, bagan dan *gillnet*, pemberi modal/ tengkulak, pedagang ikan (Tuna dan Cakalang) petugas TPI, Petugas KUD, Petugas Dinas Perikanan dan Kelautan, petugas HNSI dan Pemda Sukabumi. Metode pengambilan responden dilakukan melalui metode *purposive sampling* yang dapat mewakili tujuan penelitian melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu terhadap nelayan, pedagang serta responden lainnya yang terkait.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara disusun dalam bentuk tabulasi. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menggambarkan saluran pemasaran, sistem pelelangan ikan dan permasalahan yang timbul dalam kegiatan pemasaran ikan di PPNP serta analisis kebijakan PUMP untuk menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan yang dapat mengurangi ketergantungan nelayan terhadap pemilik modal. Analisis kuantitatif terdiri dari analisis margin pemasaran, biaya dan keuntungan pemasaran serta *fisherman's share*. Secara matematis, analisis kuantitatif yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1). Menghitung Margin Pemasaran (Hanafiah, 1986)

$$M_i = H_i - H_{i-1}$$

keterangan:

M_i = Margin pada pedagang perantara ke-1 hasil tangkapan (Rp/kg)

H_i = Harga penjualan pedagang perantara ke-1 hasil tangkapan (Rp/kg)

H_{i-1} = Harga pembelian pedagang perantara ke-1 hasil tangkapan (Rp/kg)

- 2). Menghitung Total Keuntungan Pemasaran (Hanafiah, 1986)

$$KM = MP - BP$$

keterangan:

KM = Total keuntungan pemasaran (Rp/kg)

MP = Margin pemasaran (Rp/kg)

BP = Total biaya pemasaran (Rp/kg)

- 3). Menghitung fisherman's share (Hanafiah, 1986)

$$FS = [HP \div HK] \times 100\%$$

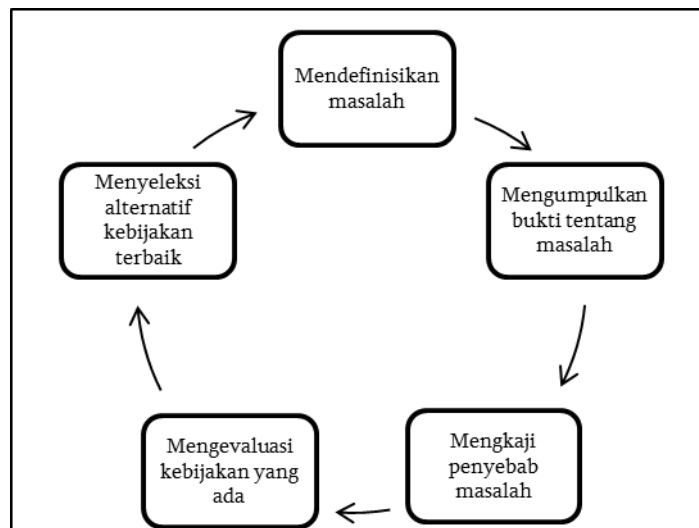
keterangan:

FS = Fisherman's share/ Bagian yang diperoleh nelayan (%)

HP = Harga jual ditingkat nelayan (Rp)

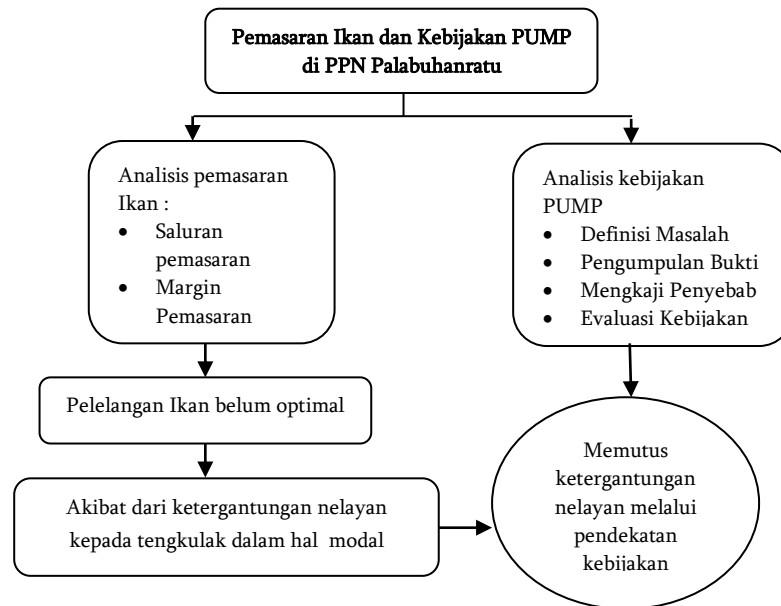
HK = Harga jual ditingkat konsumen (Rp)

Analisis kualitatif terhadap kebijakan PUMP dilakukan melalui analisis kebijakan yang dilakukan dalam enam tahapan proses analisis dalam rangka membuat sebuah rekomendasi kebijakan alternatif. Proses analisis kebijakan ada pada Gambar 1.



Gambar 1 Proses Analisis Kebijakan (Suharto, 2008)

Untuk menjelaskan keterkaitan antara sistem pemasaran dan pentingnya analisis kebijakan PUMP, maka alur pemikiran dijelaskan dalam kerangka berfikir penelitian pada Gambar 2.

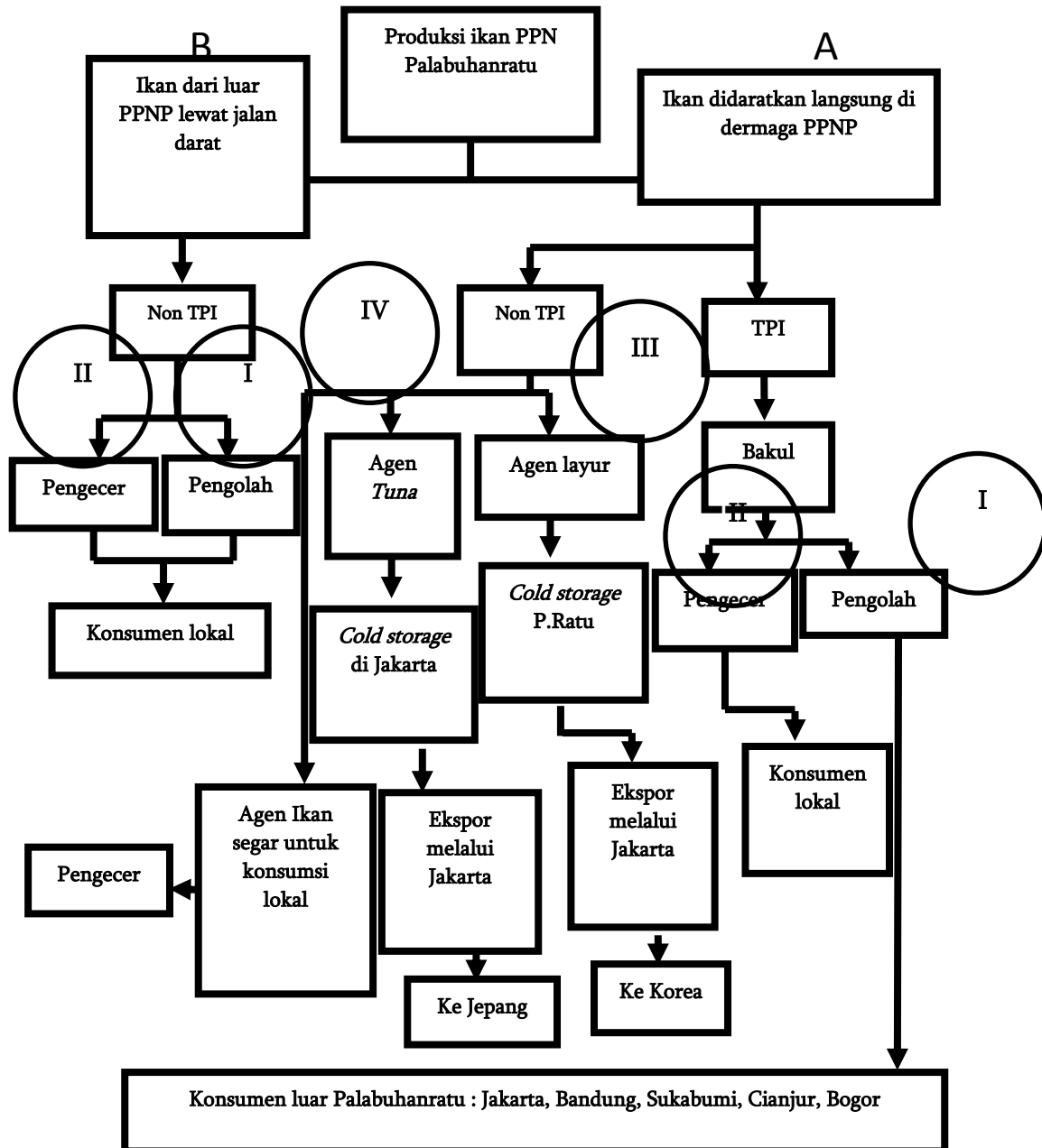


Gambar 2 Kerangka Berfikir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemasaran Ikan di PPN Palabuhanratu

Lembaga pemasaran yang ada di PPNP adalah nelayan, bakul, eksportir, pedagang pengecer dan pengolah ikan. Kegiatan pemasaran ikan di PPNP dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu pemasaran ikan hasil tangkapan laut dan pemasaran ikan dari darat. Pemasaran melalui TPI dilakukan berdasarkan hasil lelang dengan sistem penawaran tertinggi. Sedangkan pemasaran tanpa melalui TPI untuk ikan tujuan ekspor. Untuk Ikan-ikan yang di daratkan dari laut, pemasaran melalui TPI hanya ikan-ikan tujuan lokal sedangkan untuk ikan tujuan ekspor seperti Tuna dan Layur maka setelah didaratkan di dermaga PPNP segera didistribusikan ke agen untuk di kemas dan di simpan di cold storage sebelum di kirim melalui Jakarta untuk tujuan ekspor ke negara Korea dan Jepang. Gambar 3 menjelaskan pola pemasaran ikan yang ada di PPNP.



Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi (2008) diolah kembali

Gambar 3 Pola Pemasaran Ikan di PPN Palabuhanratu

Keterangan Gambar :

A. Ikan yang didaratkan melalui Laut

- I : Saluran Pemasaran I (Nelayan (TPI)-Bakul-Pengolah-Konsumen luar PPNP)
- II : Saluran pemasaran II (Nelayan (TPI)-Bakul-Pengecer-Konsumen Lokal)
- III : Saluran pemasaran III (Nelayan (Non TPI)-Agen Layur/Eksporir- Korea)
- IV : Saluran pemasaran IV (Nelayan (Non TPI)-Agen Tuna/Ekspotir- Jepang)

B. Ikan dari luar TPI melalui darat

- I : Saluran Pemasaran I (Nelayan (Non TP)-Pengolah-Konsumen lokal)
- II : Saluran pemasaran II (Nelayan(Non TPI)-Pengecer-Konsumen lokal)

Margin Pemasaran, Biaya Pemasaran, Keuntungan Pemasaran dan Fisherman's Share

Perhitungan margin pemasaran dilakukan terhadap ikan ekonomis penting yang banyak didaratkan di PPNP yaitu Ikan Tuna dan Ikan Cakalang yang dijual antara nelayan, bakul dan pedagang pengecer. Untuk perhitungan margin pemasaran, biaya pemasaran, keuntungan pemasaran serta fisherman's share hanya dilakukan pada saluran pemasaran II karena dibatasi oleh ikan-ikan yang dijual segar dan bukan untuk olahan serta keterbatasan daerah penelitian disebabkan harga ikan yang dijual di pasar luar PPNP tidak diketahui.

Tabel 1 Margin dan Keuntungan Pemasaran Ikan Tuna dan Cakalang pada Saluran II di PPN Palabuhanratu

Uraian	Ikan Tuna		Ikan Cakalang	
	Rp per kg	Share (%)	Rp per kg	Share (%)
(1) Nelayan				
a. Harga Jual	17000	51,5	12000	40,0
(2) Bakul/tengkulak				
a. Harga Jual	26000	78,8	17000	56,7
b. Harga Pokok	17000	51,5	12000	40,0
c. Margin Pemasaran	9000	27,2	5000	16,7
d. Biaya Pemasaran	1400	4,24	1300	4,33
e.Keuntungan Pemasaran	8600	26,0	3700	12,3
(3) Pedagang pengecer				
a. Harga Jual	33000	100	30000	100
b. Harga Pokok	26000	78,8	17000	56,7
c. Margin Pemasaran	7000	21,2	3000	10,0
d. Biaya Pemasaran	1300	3,93	1300	4,33
e.Keuntungan Pemasaran	5700	17,3	1700	5,67

Sumber : Diolah dari data primer tahun 2011

Dari Tabel 1 dijelaskan bahwa, pada pemasaran ikan Tuna saluran II, margin pemasaran yang dinikmati bakul adalah Rp 9.000 per kg, dan margin pemasaran pengecer adalah Rp 7.000 per kg. Harga ikan Tuna (grade B) di tangan konsumen cukup tinggi hingga mencapai Rp 32.000/kg padahal harga ikan tersebut di nelayan hanya Rp 17.000/kg. Meskipun nelayan menjual hasil tangkapannya di TPI melalui pelelangan namun penawaran harga tertinggi sulit didapatkan saat lelang, karena bakul sudah menguasai harga dan ada kesepakatan antara petugas TPI dan bakul. Harga ikan tuna di PPNP yang melalui lelang hanya berkisar 16.000 – 18.000/kg. Seharusnya harga ikan masih bisa dinaikkan jika proses lelang benar-benar sehat. *Fisherman share* yang didapatkan nelayan pada pemasaran ikan tuna adalah 51.5 % sedangkan pada pemasaran ikan cakalang adalah 40 %. Share nelayan terhadap pemasaran sudah cukup efisien pada perikanan tuna karena sudah di atas 50%, namun belum efisien pada pemasaran ikan Cakalang karena masih di bawah 50%.

Proses Analisis Kebijakan PUMP**Identifikasi masalah pemasaran ikan**

Pemasaran hasil tangkapan di PPN Palabuhanratu untuk ikan hasil tangkapan armada payang, bagan, pancing rumpon adalah melalui sistem pelelangan di TPI. Untuk hasil tangkapan gillnet, TPI tidak melelangnya karena hasil tangkapan armada gillnet sedikit. Selain gillnet, ikan hasil tangkapan dari armada purse seine juga tidak dilelang karena diprioritaskan untuk di ekspor. Hal ini sesuai dengan Perda Kabupaten Sukabumi No. 7 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Berdasarkan perda tersebut, Pemerintah Daerah berwenang mengatur, mengurus dan mengawasi pelelangan ikan dengan tujuan :

- a) meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan nelayan
- b) mendapatkan kepastian pasar dan harga ikan yang layak bagi nelayan maupun konsumen
- c) memberdayakan kelompok nelayan, koperasi dan Badan yang memiliki usaha dalam bidang perikanan
- d) meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan nelayan.

Permasalahan pemasaran ikan di PPNP sebenarnya banyak terjadi pada saluran pemasaran yang melibatkan pemilik modal dalam hal ini berlaku sebagai bakul/pedagang besar. Sebelum pelelangan dimulai kembali pada bulan Agustus 2011, kondisi pemasaran ikan sangat merugikan nelayan. Dari kajian lapang dihasilkan bahwa ikan-ikan yang dijual langsung ke pemberi modal (tengkulak/pengijon) sangat rendah harganya dibandingkan jika dijual ke TPI. Oleh karena itu banyak nelayan yang menginginkan pelelangan dibuka kembali.

Namun setelah pelelangan ikan dimulai kembali dan dilakukan pengamatan serta wawancara kepada responden nelayan yang mengikuti lelang, di dapatkan fakta bahwa ikan-ikan yang dijual ke TPI biasanya akan dibeli oleh bakul yang memberi modal kepada nelayan yang menjual ikan di TPI. Meski tidak tertulis, namun ada pemahaman di kalangan peserta lelang bahwa ikan-ikan yang dijual nelayan A adalah milik Bakul X demikian seterusnya. Sehingga meski ada pelelangan namun bakul masih punya posisi tawar dalam menentukan harga karena biasanya pelelangan jatuh pada harga yang ditentukan bakul pemberi modal dan jarang sekali harga ikan ditentukan oleh juru lelang melalui lelang yang sesungguhnya.

Ketergantungan nelayan terhadap bakul/tengkulak menyebabkan proses lelang tidak berjalan sehat. Dari responden nelayan yang diwawancarai, mereka rata-rata memiliki pendapat yang sama bahwa pelelangan sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui harga ikan, untuk menghitung berat sesungguhnya hasil tangkapan dan mempercepat transaksi penjualan ikan. Meski sudah ada kegiatan lelang di PPNP, nelayan berharap dominasi bakul/tengkulak bisa dikurangi melalui kebijakan pemberian modal dan perbaikan kinerja petugas pelelangan agar ketergantungan pada bakul bisa terputus dan tidak ada lagi kecurangan dalam sistem lelang.

Pengumpulan bukti terkait permasalahan

Dari kajian lapang mengenai pelelangan ikan di PPN Palabuhanratu didapatkan beberapa fakta terkait dengan masalah dalam pelelangan ikan yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebelum kegiatan lelang dijalankan kembali, harga ikan banyak dipermainkan oleh bakul karena ketergantungan nelayan terhadap bakul (pemilik modal)
- 2) Setelah kegiatan lelang dilaksanakan pada Agustus 2011, harga ikan tidak lagi ditetapkan bakul tetapi di serahkan pada penawaran tertinggi saat lelang. Namun ternyata ada kesepakatan tidak tertulis antara petugas lelang, bakul dan nelayan terhadap keputusan lelang. Sehingga meski ada pelelangan namun bakul masih punya posisi tawar dalam menentukan harga. Hal ini karena adanya ketergantungan modal antara nelayan dan bakul.

Mengkaji penyebab masalah

Berjalannya pelelangan ikan di PPNP sebenarnya tidak secara langsung memutus dominasi pemilik modal terhadap nelayan kecil. Sehingga penyebab permasalahan dalam sistem pemasaran (pelelangan ikan) di PPNP adalah ketergantungan modal nelayan terhadap

pemilik modal/bakul. Dan solusinya adalah bagaimana memberikan penguatan modal usaha kepada nelayan dengan meniadakan dominansi bakul dan pelaksanaan lelang yang sehat.

Evaluasi kebijakan pemberdayaan usaha mina perdesaan (PUMP)

Sejak tahun 2009, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) di bawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dan berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri KP tetap dilanjutkan pada tahun 2011 melalui dua komponen yaitu Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).

Berdasarkan Perpres 15/2010, Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) merupakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan Dan Perikanan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja Di Perdesaan. Bentuk Kegiatan PUMP adalah melalui pemberian bantuan langsung yang berdampak meningkatkan pendapatan nelayan dan juga membantu nelayan dalam mengatasi kesulitan permodalan dalam mendukung usaha produktif di perdesaan.

Indikator Keberhasilan PUMP Perikanan Tangkap dari sisi *output* antara lain (KKP, 2011):

- a. Tersalurkannya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP)
- b. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kelembagaan KUKP melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan.

Sedangkan indikator *outcome* yaitu meningkatnya pendapatan dan penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan di pedesaan. Untuk melakukan evaluasi terhadap Kebijakan PUMP dengan mengaitkan berbagai kebijakan serupa yang pernah dijalankan pemerintah. Beberapa poin evaluasi berbagai program Kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan yang pernah dan sedang dijalankan dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Kualitatif terhadap Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

No	Poin	Hasil
1	Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat seperti PEMP dan LKM terhadap pendapatan nelayan	Program tersebut telah selesai dijalankan namun tidak ada efek signifikan terhadap peningkatan pendapatan nelayan. Pada umumnya disebabkan karena kurang sosialisasi terhadap nelayan sehingga nelayan tidak mengerti tentang program tersebut
2	Efektifitas program terhadap upaya memutus ketergantungan nelayan terhadap tengkulak	Belum efektif karena seringkali salah sasaran. Kuatnya keterikatan nelayan terhadap tengkulak menjadi salah satu penyebabnya.
3	Efektifitas program terbaru KKP yaitu PUMP terhadap upaya memutus ketergantungan nelayan terhadap tengkulak	Belum efektif karena dari temuan di lapangan, ternyata dalam pelaksanaan PUMP banyak sekali tengkulak yang mengkoordinir nelayan untuk menjadi kelompok usaha agar mendapat bantuan dimana tengkulak menjadi ketuanya

No	Poin	Hasil
4	Keberlanjutan Program PEMP dan LKM	Tidak ada tindak lanjut dan evaluasi terhadap program PEMP, LKM dan yang lainnya sehingga dampaknya belum bisa terukur

Sumber : Hasil wawancara dengan dinas KP kabupaten Sukabumi (2011)

Kebijakan PUMP merupakan kebijakan baru namun secara substansi tidak ada bedanya dengan berbagai Kebijakan pemberdayaan masyarakat yang telah berlalu seperti PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) dan dibentuknya Lembaga Keuangan Mikro sebagai solusi bagi masalah modal nelayan. Berbagai Kebijakan tersebut ternyata tidak memberikan pengaruh signifikan pada pendapatan nelayan dan tidak mampu memutus ketergantungan nelayan terhadap bakul/tengkulak dalam masalah modal dan pinjaman. Nelayan PPNP lebih suka meminjam modal kepada bakul/tengkulak karena nelayan tidak bisa meminjam uang (modal untuk melaut) ke bank karena tdk memiliki agunan. Sebanyak 30% nelayan responden menyatakan bahwa mereka menjual hasil tangkapan ke pemberi modal karena sebagai bentuk ucapan terima kasih sudah dipinjamkan modal, sebanyak 50% responden menyatakan bahwa tengkulak meminta hasil tangkapan sebagai sistem pembayaran pinjaman modal, sisanya menyatakan bahwa nelayan menjualkan hasil tangkapannya sendiri namun hasilnya dipotong untuk membayar pinjaman modal.

Seleksi Alternatif Kebijakan Terbaik

Secara substansi program PUMP sebenarnya meniru program pemberdayaan yang telah dilakukan sebelumnya seperti PEMP, PEMD, PMDKE dan P3DT dan bukan program yang baru. Program-program tersebut terbukti belum mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Kondisi demikian disebabkan oleh faktor (Solihin et al, 2005):

- 1) Pendekatan yang dilakukan lebih bersifat structural dan mengabaikan variable cultural yang sedang dan terus berkembang di masyarakat. Akibatnya program tersebut mengalami hambatan pada tatanan implementasi
- 2) Kebocoran dana program di tingkat implementasi oleh tindak korupsi antara oknum pemerintah yang menjadi *rent seeker* dan konsultan pelaksana program
- 3) Program-program pemberdayaan tersebut biasanya tidak memiliki jaminan keberlanjutan dan akuntabilitas publik
- 4) Pelaksanaan program pemberdayaan serupa tidak mempunyai mekanisme pengawasan dan sanksi yang jelas.

Proses menyeleksi kebijakan melalui 2 (dua) penilaian yaitu *feasibility and effectiveness* (Suharto, 2008). Feasibilitas merupakan probabilitas mengenai apakah suatu kebijakan akan diterima audien kebijakan (pemerintah atau badan pemerintah). Sedangkan efektifitas menunjuk pada kemungkinan bahwa kebijakan kita akan menghasilkan manfaat-manfaat yang dapat mengurangi permasalahan. Prinsip umum menunjukkan bahwa feasibilitas biasanya dipandang sebagai kriteria yang lebih penting daripada efektifitas.

Dari sisi penilaian feasibilitas, maka kebijakan berupa pemberian modal usaha melalui Program pemberdayaan masyarakat dipilih oleh pemerintah karena memang kebijakan serupa pernah dijalankan. Dari sisi pembentukan kelompok (kolektif) adalah strategi yang cukup baik dalam mengorganisir nelayan, namun perlu adanya pendampingan secara formal dan informal serta tidak menyerahkan sepenuhnya kepada nelayan. Pendampingan ini mencegah masuknya tengkulak sebagai ketua kelompok yang mengorganisir nelayan. Pendekatan kelompok juga paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumberdaya juga lebih efisien. Penduduk miskin pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan diri. Oleh karena itu

diperlukan pendamping untuk membimbing mereka dalam upaya memperbaiki kesejahteraannya. Pendamping ini dalam konsep pemberdayaan sangat esensial, dan fungsinya menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat sebagai fasilitator, komunikator, ataupun dinamisor serta membantu mencari cara pemecahan masalah yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri.

Program PUMP akan bisa berjalan dengan baik jika memperhatikan beberapa faktor: *pertama*, dilakukan melalui pendekatan kultural untuk menciptakan *community relationship* dan kesejahteraan nelayan, kedua: Bantuan Langsung Masyarakat harus rutin diaudit agar tidak ada penyalahgunaan dana dan modal benar-benar bisa sampai ke nelayan. ketiga : evaluasi dan keberlanjutan program harus dilakukan meski ada perubahan kepemimpinan, keempat : harus diikuti oleh mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.

Dari sisi efektifitas, bisa jadi kebijakan Pemberian Modal kurang efektif karena banyak permasalahan turunan dan membuka peluang penyalahgunaan dana. Dibandingkan dengan Kebijakan perbaikan sistem bagi hasil yang lebih efektif karena langsung menyentuh nelayan. Namun berdasarkan fakta di lapangan, kebijakan sistem bagi hasil ini tidak mudah diterapkan karena keterikatan nelayan sudah mengakar secara sosial budaya dan para tengkulak di PPNP pada dasarnya hanya sebatas pekerja karena dibalik tengkulak terdapat pemilik modal yang lebih besar lagi sehingga upaya menjalin kemitraan agak sulit dilakukan jika posisi nelayan tidak diperkuat dengan membentuk kelompok dan membuka akses ekonomi alternatif selain tengkulak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap pemasaran ikan dan kebijakan PUMP di PPN Palabuhanratu, dapat disimpulkan bahwa, margin pemasaran pada perikanan Tuna dan Cakalang terbesar ada pada bakul dan pengecer sebesar Rp 9000/kg dan Rp 7000/kg. *Fisherman's share* untuk penjualan hasil tangkapan Tuna sebesar 51,5% dan hasil tangkapan Cakalang sebesar 40%. Disini jelas bahwa bakul masih memegang peran penting dalam pemasaran ikan mesti telah ada pelelangan ikan karena ternyata pelelangan ikan tidak berjalan dengan sehat. Dominasi bakul dalam pemasaran ikan dikarenakan masih adanya ketergantungan yang kuat antara nelayan dan bakul dalam hal penyediaan modal

Hasil analisis kebijakan menunjukkan bahwa Program PUMP akan bisa berjalan dengan baik jika memperhatikan beberapa faktor: *pertama*, dilakukan melalui pendekatan kultural untuk menciptakan *community relationship* dan kesejahteraan nelayan, kedua: Bantuan Langsung Masyarakat harus rutin diaudit agar tidak ada penyalahgunaan dana dan modal benar-benar bisa sampai ke nelayan. ketiga : evaluasi dan keberlanjutan program harus dilakukan meski ada perubahan kepemimpinan, keempat : harus diikuti oleh mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanafiah AM dan AM Saefudin. 1983. Tataniaga Hasil Perikanan. UI Press. Jakarta.
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011. Buku Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Kelautan Perikanan Tahun 2011.
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011. Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Kelautan Perikanan Tahun 2011.
- PPNP. 2008. Buku Statistika Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu tahun 2008.

- PEMDA Sukabumi. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
- Satria A. 2009. Ekologi Politik Nelayan. PT. LKiS. Yogyakarta.
- Solihin A, Karim M, Suhana, Nugroho T. 2005. Strategi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Indonesia (Bunga Rampai). Humaniora. Bandung
- Suharto E. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Cetakan keempat. Penerbit ALFABETA Bandung. 238 halaman.